



Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD): Kajian pada Badan Pendapatan Daerah, Kantor Dinas Olahraga Dan Pemuda

Fatimah Azzhara¹, Nur Asri Elita Daulay², Jeremi Putranta³, Syamsul Allim⁴

^{1,2,3,4}Program Pendidikan Ekonomi, Fakultas Penulis Korespondensi: Fatimah Azzhara
Ekonomi, Universitas Negeri Medan e-mail: fatimah.azzahra123@gmail.com

Email: fatimah.azzahra123@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 25 Agustus 2023

Diterima: 30 Sept. 2023

Tersedia Online: 30 Sept 2023

Kata kunci :

Management, Keuangan Daerah,
Penatausahaan

ABSTRAK

Berdasarkan studi kasus permasalahan utama dalam pengelolaan harta bersama antara lain adalah penggunaan harta milik oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pencatatan yang tidak teratur, sumber daya yang tidak memadai, dan disertakan kepemilikan yang tidak jelas. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengelolaan aset tetap memberikan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data hasil studi literatur. Data untuk penulisan tinjauan pustaka ini diperoleh dengan cara mencari makalah yang dikumpulkan dengan menggunakan database Google School dan website jurnal dan makalah yang tersedia. Solusi yang dapat diberikan atas permasalahan tersebut ialah: 1. Meningkatkan Pengawasan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 4. Meningkatkan Kerjasama antar Instansi. Dari studi kasus yang disajikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan real estate regional di berbagai daerah masih kurang optimal. Penyebab utama permasalahan pengelolaan aset daerah adalah kurangnya kapasitas dan integritas sumber daya manusia serta kapasitas staf pengelola aset daerah yang berjumlah orang, sehingga pelaporan dan inventarisasi aset daerah tidak terproses dengan baik.

Artikel History:

Received: 25 August 2023

Accepted: 30 Sept 2023

Available Online: 30 Sept 2023

Keywords:

Management, Regional Finance,
Indemulation

Among the case studies of the main issues of collective property management are the misappropriation of property by others according to established procedures, irregular record-keeping, inadequate resources, and the inclusion of unclear ownership. The study identified factors that hamper asset management remained the solution. The study USES qualitative methods with a case-study approach. The type of data used by the authors in this study is the data of literature studies. The data for writing this library review is obtained by locating a paper collected using the Google school database and the journal website and available paper that can be given on the problem: 1. Increasing surveillance 2. Increase human resources 3. Increasing community participation 4. Improving inter-office cooperation from case studies presented in the study, it seems that regional real estate management in the areas is still less than optimal. The main causes of problems for management of local assets are the lack of the capacity and integrity of human resources and the capacity of the management staff of a number of local assets, thus not well processed reporting and inventory of local assets. .

1. PENDAHULUAN

Aset daerah harus dikelola secara optimal dengan berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik (Andrei, Bakar & Sargiacomo, 2017). Mengenai tingkat kekayaan daerah (Sukmadilaga, Pratama & Mulyani, 2015) mengatakan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset dan aset daerah antara lain adalah tercapainya tertib pengelolaan aset daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, terjaminnya keamanan aset daerah, dan terjaminnya keakuratan data dan informasi aset daerah.

Namun pada kenyataannya banyak organisasi seperti Badan Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua yang mempunyai permasalahan dengan pengelolaan kekayaan daerah nya(BMD). Masih banyak daerah dimana Berdasarkan ikhtisar studi kasus, permasalahan utama dalam pengelolaan harta bersama antara lain adalah penggunaan harta milik oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pencatatan yang tidak teratur, sumber daya yang tidak memadai, dan disertakan kepemilikan yang tidak jelas.

Penelitian sebelumnya terkait manajemen aset tetap telah dilakukan oleh Bova (2016), Quirin & O'Bryan (2014), dan Prabowo (2016). Kajian ini mengevaluasi kegiatan administratif semata-mata berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab ketidaksesuaian antara pengelolaan dan regulasi adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya remunerasi, kurangnya koordinasi, kurangnya peralatan, kurangnya data pendukung aset tetap, dan kurangnya disiplin dan komitmen manajemen terhadap Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, serta memberikan solusinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif merupakan suatu metode kerja yang memungkinkan peneliti menggali lebih dalam fenomena-fenomena di lapangan dan menggali lebih dalam data-data mengenai permasalahan yang sangat relevan dengan penelitian kualitatif.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data hasil studi literatur. Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dan sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian dari hasil penelitian peneliti terdahulu yang berupa buku dan laporan ilmiah, bukan observasi langsung Data untuk penulisan tinjauan pustaka ini diperoleh dengan cara mencari artikel yang dikumpulkan dengan menggunakan database Google School dan website jurnal dan artikel yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pajak Provinsi Sulawesi Utara.

Penanganan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di lingkungan Badan Pengelola Barang Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini termasuk Pedoman Pengelolaan Properti Masyarakat.

Hal ini menarik perhatian pada berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan properti lokal, seperti penggunaan properti oleh orang lain tanpa mengikuti prosedur, pertukaran jumlah item yang mungkin berdampak negatif pada pemerintah lokal, catatan yang terganggu, dan konflik kepentingan diperlukan dan Penggunaan aset, pelaporan yang tidak konsisten. Sumber daya manusia masih terbatas dalam hal integritas karena prosedur yang ada tidak dipatuhi.

Pengelolaan kekayaan daerah pada Badan Keuangan Daerah (BAPENDA) dilakukan dengan cara: (1) Akuntansi Barang Milik Daerah (BMD) Seluruh barang yang masuk dalam BAPENDA Sulut akan dimuat tanpa memperhatikan apakah masih dalam pengadaan APBD. Memuat dan bandingkan buku bisnis yang didukung oleh SIMDA BMD. Setiap barang disesuaikan dengan klasifikasi dan pengkodean barang, serta memiliki kartu inventaris (KIB) sebagai identifikasi manual. (2) Inventarisasi Real Estate Daerah (BMD) BAPENDA melalui sistem SIMDA melakukan inventarisasi tahunan untuk mengetahui kesesuaian dan kondisi real estate daerah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan di bidang real estate. (3) Laporan Properti Komunitas (BMD) Laporan Properti Komunitas disusun setiap semester dan tahunan oleh perwakilan pemilik properti berdasarkan kondisi properti. File yang perlu dilaporkan harus memenuhi kriteria kecocokan laporan.

Pengelolaan Barang Milik Masyarakat (BMD) di Kabupaten Kepulauan Talaud

Pengelolaan barang milik masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud masih buruk. Penyebab tidak efektifnya pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut. Sumber daya manusia belum mencukupi, dasar hukum belum konkrit, bukti kepemilikan belum jelas, penilaian aset belum dilakukan, komitmen pimpinan dan sikap pemerintah masih acuh tak acuh. Permasalahan yang muncul dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah pengelolaan aset. Dalam pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kendala dalam pengelolaan barang milik masyarakat sehingga memberinya status Eksepsi (WDP). (1). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud belum melakukan kajian lahan kolong jalan. (2). Fasilitas keamanan kurang memadai. (3). Pencatatannya masih dikelompokkan antara aktiva tetap, peralatan dan mesin. (4). Ruas jalan yang statusnya diubah menjadi 'Negara' tetap dicatat sebagai kepemilikan lokal. Permasalahan pengelolaan barang milik masyarakat yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud : (a) Sumber Daya Manusia Karena kekurangan sumber daya manusia (SDM), banyak rangkap jabatan dalam pengurusan barang milik masyarakat, BMD tidak dapat dilaporkan dan diproses. Sehingga implementasikan tidak benar. (b) Landasan Hukum Kebijakan pengelolaan properti daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 belum tercapai karena masih kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan kebijakan properti daerah di kalangan pengelola properti daerah. (c) Bukti Kepemilikan Tidak adanya dokumentasi dan bukti yang jelas atas pembelian atau perolehan

properti yang ada merupakan bukti nyata kepemilikan properti lokal di Kabupaten Kepulauan Talaud. (d) Penilaian Aset Penilaian Aset terus dilakukan untuk memverifikasi nilai aset yang dimiliki real estate lokal, baik pengadaan lama maupun pengadaan baru. (e) Komitmen Pimpinan Kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengelola mengenai aset masyarakat yang dapat dihapusbukukan dan dimusnahkan sehingga mengakibatkan kurangnya pertimbangan terhadap aset masyarakat. (f) Sikap tanggung jawab Walaupun barang nasional dan daerah tercampur dalam administrasi publik, namun pengawasan tetap mengutamakan barang lokal.

Pengelolaan Aset Tetap Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Pengelolaan aset Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua masih belum berjalan dengan baik. Sebab, Dinas Aset Olah Raga dan Pemuda Provinsi Papua terbilang kurang aktif dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, serta pelaporan aset tetap secara berkala. Penyebabnya adalah kurangnya aktivitas petugas yang bertugas melakukan pencatatan aset tetap di Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, yang berdampak pada kurang memadainya pengelolaan aset tetap di Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Begitu pula pada inventarisasi aset tetap, jenis dan spesifikasi yang tidak jelas, kondisi produk yang tidak jelas, dan beberapa barang tidak diberi nomor sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan aset masyarakat pada Biro Olahraga dan Pemuda Kantor Provinsi Papua. Namun hasil penelitian menunjukkan keadaan sebaliknya,

1. Pendaftaran aset tetap pada DISPORA Provinsi Papua telah dilakukan, perhitungan jumlah aset tetap akurat, semua aset tetap diberi kode, dan pemilihan aset tetap dilakukan secara berkala setiap tahun. Peralihan aset tetap milik Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua selalu dicatat.
2. Jumlah aset tetap DISPORA Provinsi Papua sudah benar, asal usul seluruh aset tetap jelas, waktu pengadaan aset tetap jelas, dan harga seluruh aset tetap akurat. Aset tetap Dinas Olahraga Provinsi Papua dan pemuda dalam kondisi baik.
3. Penyusunan laporan harta tetap DISPORA Provinsi Papua dikatakan sudah baik dan jelas. Laporan aset tetap dapat dilihat oleh masyarakat yang memerlukan data dari aset tetap Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Petugas selalu berhati-hati dalam pemeliharaan aset tetap yang ada di kantor, perkiraan harga aset tetap wajar dan staf memastikan bahwa anggota Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua telah melakukan hal yang benar dalam menjaga aset tetap yang ada di kantor.

Kepemilikan daerah seringkali menjadi kontroversi karena kurangnya minat dari pemerintah daerah dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Oleh karena itu, pemantauan, pencatatan dan pemeliharaan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kerugian akibat hilangnya aset daerah dan komplikasi kepemilikan aset tersebut.

Solusi berikut dapat dipertimbangkan terhadap masalah pengelolaan properti daerah.

1. Penguatan pengawasan Pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan pengelolaan BMD dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan internal. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BMD.
2. Peningkatan kapasitas pegawai Pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan BMD. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas kepada karyawan yang terlibat dalam pengelolaan BMD.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat Pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BMD. Hal ini dapat dicapai melalui

sosialisasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan BMD.

4. Memperkuat kerjasama antar kementerian Pemerintah daerah dapat memperkuat kerjasama antar kementerian dalam pengelolaan BMD. Hal ini dapat dicapai dengan membangun jaringan kerja sama yang kuat antar otoritas terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan (BPKP), Badan Pengawas, dan Kejaksaan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, otoritas pendapatan daerah Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan memastikan aset tetap terjaga dan digunakan sebagaimana mestinya.

4. SIMPULAN

Mengatasi pengelolaan real estate lokal yang kurang optimal memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pengelolaan aset daerah yang baik tercermin dari tertibnya keuangan pemerintah daerah. Dari studi kasus yang disajikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan real estate regional di berbagai daerah masih kurang optimal. Penyebab utama permasalahan pengelolaan aset daerah adalah kurangnya kapasitas dan integritas sumber daya manusia serta kapasitas staf pengelola aset daerah yang berjumlah orang, sehingga pelaporan dan inventarisasi aset daerah tidak terproses dengan baik. Setiap daerah mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dalam pengelolaan barang milik daerah. Pedoman Standar Pengelolaan Aset Daerah menjadi acuan dalam pengelolaan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibekob, Adonia Abigael, Syaikhul Falah, Arius A. Kambu. (2021). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Kantor Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Papua. 6(1), 1-14.
<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/1664>
- Kurniati, Evy, Thatok Asmony, Dudi Santoso. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). 8(3), 540-558.
<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/850/pdf>
- Lantemona, Insteng, Ventje Ilat, Hendrik Manossoh. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. 8(1), 211-221.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15374>
- Oroh, Yosua Heleluya, Sintje R. (2021). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 9(2), 395-403.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/download/33475/31675>
- Theodora, Fernanda, Febri Y, Meyzi H. (2019). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah. 15(3), 348-353.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7891/6088>